

KAJIAN TERHADAP UNSUR BERPOTENSI KONFLIK KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN

Husnul Fatimah

FKIP, Universitas Sriwijaya

Email: husnulfatihah@fkip.unsri.ac.id

Abstract. *The purpose of this research is to describe conflict potential element of cultural aspect in Melayu community of Musi Rawas as the basic of regency of Musi Rawas for developing multicultural education model of Musi Rawas Regency. To get the comprehension of the problem the researcher uses the qualitative approach. The whin informan, is chosen base on requiremental developed by Spradlay, while for the next informan use the snowball sampling technique, interview and documentation wherever researcher acts as the key instrument. To warranty the data validity, examination technique with informan and technique triangulation. Research data is analied by referring to Spradlay method, the result of the research shows that conflict potenciales element of cultural aspects are forward in implementation of cultural value (mentality) and the tradition of Melayu Musi Rawas community, consist of menerabas, primordialism, egoism, and the "tujah" tradition. It is advisable for local governments to done maximum potential conflict. In education this research can be a reference in the development of multicultural education in order to create a generation that has a high tolerance.*

Keywords: *Conflicts, Multicultural, Education*

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan potensi konflik pada unsur budaya masyarakat Melayu Musi Rawas sebagai dasar mengembangkan model pendidikan multikultural Kabupaten Musi Rawas. Untuk mendapatkan pemahaman masalah peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Informan dipilih berdasarkan kebutuhan yang dikembangkan oleh Spradlay, sedangkan untuk informan berikutnya menggunakan teknik snowball sampling, wawancara dan dokumentasi di mana pun peneliti bertindak sebagai instrumen kunci. Untuk menjamin validitas data, teknik pemeriksaan dengan informan dan teknik triangulasi. Data penelitian dilatarbelakangi dengan mengacu pada metode Spradlay, hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur potensi konflik budaya yang maju dalam pelaksanaan nilai budaya (mentalitas) dan tradisi masyarakat Melayu Musi Rawas, terdiri dari menerabas, primordialisme, egoisme, dan tradisi "tujah". Sangat disarankan bagi pemerintah daerah untuk melakukan potensi konflik maksimum. Dalam pendidikan penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan pendidikan multikultural agar tercipta generasi yang memiliki toleransi yang tinggi.

Kata kunci: Konflik, Multikultural, Pendidikan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki lebih dari 700 bahasa daerah, 300 suku bangsa, lima agama besar dan 13.000-an pulau (Budiman, 2005: 214). Kemajemukan tersebut memiliki dua sisi, membanggakan sekaligus mencemaskan. Jika dimanfaatkan dapat menghasilkan keuntungan bagi Negara, berupa materil

maupun moril. Beberapa contoh, pulau Bali digemari oleh wisatawan karena Pura agama Hindu yang anggun dan upacara *Ngaben* yang menarik, kemudian Kalimantan terkenal karena sekelompok kecil suku Dayak Punan yang terkenal rasa pekanya.

Di sisi lain, mengandung potensi konflik yang dapat memecah belah Negara kesatuan Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari konflik-konflik yang terjadi masih

dilatarbelakangi perbedaan suku dan agama, baik terjadi sebelum maupun sesudah reformasi. Konflik yang terjadi sebelum reformasi diantaranya konflik Situbondo (Oktober 1996), Tasikmalaya (Desember 1996), Rengasdengklok (Januari 1997), Banyuwangi (September, 1998), Ketapang (November, 1998), Kupang (Desember, 1998).

Setelah reformasi konflik berlatarbelakang suku dan agama masih sering terjadi. Peristiwa mengejutkan terjadi pada akhir tahun 2008, konflik terbuka bernuansa agama terjadi di Masohi Maluku Tengah. Konflik ini juga mengingatkan kita pada konflik di Poso Sulawesi Selatan dan Ambon pada tahun 1999 yang menjadi luas dan berlarut-larut.

Konflik skala kecil berlatar belakang agama dengan beragam isu juga masih sering terjadi. Diantaranya kekisruhan Kota Bekasi akibat acara yang diselenggarakan oleh Yayasan Mahanaim, oleh penentangannya yayasan ini dinilai sebagai kristenisasi terselubung. Muncul komik yang memvisualkan Nabi Muhammad SAW, komik ini muncul di dunia *cyber* yang membuat tuduhan-tuduhan keji kepada Nabi Muhammad SAW. Akibatnya berbagai reaksi muncul dari umat Islam. Kasus lainnya berupa pembakaran gereja di Asahan, Tanjung Balai, dan kasus penganiayaan pendeta di Tapanuli (Wahid Institute, 2008: 2).

Konflik-konflik tersebut bisa jadi diawali oleh permasalahan beberapa individu dan kelompok dalam aspek ekonomi, politik, sosial maupun budaya yang kemudian diperbesar oleh beberapa kelompok dengan melibatkan simbol-simbol suku dan agama. Dalam hal ini Molan menyebut sebagai mekanisme identitas (2009: 92-93), artinya pada saat terjadi pertikaian antar individu dan kelompok yang berbeda, misalnya terjadi konflik antara orang dengan agama A dan agama B maka pada saat identitas tersebut semakin kuat sebagai wujud solidaritas.

Musi Rawas merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan Indonesia yang memiliki masyarakat beragama dari segi agama dan suku. Dari segi suku, masyarakat Musi Rawas terdiri dari beberapa suku diantaranya, Melayu, Jawa, Minangkabau, Sunda, Batak dan Bali. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel I berikut ini:

TABEL I

| Suku | Persentase | Jumlah |
|-------------|------------|---------|
| Melayu | 60 | 299.543 |
| Jawa | 30 | 149.771 |
| Bali | 3 | 14.977 |
| Minangkabau | 3 | 14.977 |
| Sunda | 7 | 34.946 |
| Batak | 7 | 34.946 |

Berdasarkan data Departemen Agama dari jumlah penduduk 505.940 jiwa, terdapat lima agama yang dianut penduduk Kabupaten Musi Rawas. Terdiri dari agama Islam, Katolik, Hindu, Budha dan Kristen lainnya, untuk lebih jelasnya dapat dirincikan sebagai berikut:

TABEL II

| Agama | Jumlah |
|-----------|---------|
| Islam | 454.179 |
| Katholik | 1.047 |
| Hindu | 2.931 |
| Budha | 125 |
| Protestan | 3.297 |

Sumber: Departemen Agama Kab.Musi Rawas

Pada tahun 1992 terjadi konflik antar desa, Karang Dapo dan Rantau Kadam yang mengakibatkan 12 orang meninggal dunia (Joko, 2003: 1). Positifnya konflik tersebut dapat segera diselesaikan dan tidak sampai melibatkan simbol-simbol suku dan agama, sehingga tidak menjadi konflik yang panjang dan berlarut-larut.

Berbeda dengan konflik sebelumnya, konflik lain terjadi pada tanggal 7 Oktober 1996 tidak dapat diselesaikan secara tuntas. Konflik tersebut merupakan konflik berskala besar yang terjadi antara 700 warga dusun Rantau Kasih dengan PT Musi Rindang Wahana di daerah Muara Kelingi

(1997: 154-156). Keadaan yang mencekam masih dirasakan hingga saat ini karena pada tahun tersebut terjadi penangkapan besar-besaran terhadap kaum laki-laki.

Menurut keterangan Hijrah (staf Kesatuan Bangsa bagian Permasalahan Masyarakat), setelah tahun 1990an sampai sekarang masih sering terjadi konflik skala kecil antar individu dan kelompok pemuda. Konflik tersebut tidak disebabkan oleh konflik yang terjadi pada tahun 1991, tetapi diantaranya disebabkan oleh pembagian irigasi dan hiburan musik pada acara pernikahan atau sunatan di rumah warga. Pada intinya konflik-konflik tersebut disebabkan oleh perbedaan yang tidak dikelola dengan baik.

Konflik yang disebabkan karena perbedaan yang tidak dikelola terjadi lagi pada tahun 2010 tepatnya bulan September. Kali ini konflik terjadi antara masyarakat dan pihak kepolisian, konflik ini menyebabkan sebuah kantor polisi terbakar habis beserta isi yang ada di dalamnya, diantaranya 3 buah sepeda motor dan barang bukti lainnya. Beruntungnya konflik tidak sampai melibatkan sentimen-sentimen suku dan agama.

Pada masyarakat Musi Rawas sering terjadi konflik, bahkan Hijrah (staf Kesatuan Bangsa bagian Permasalahan Masyarakat) menyebutkan bahwa masyarakat Musi Rawas tergolong rawan konflik, namun kondisinya masih dapat diatasi dan masih tergolong daerah yang aman, karena konflik-konflik tersebut tidak sampai berkembang menjadi konflik besar.

Berdasarkan uraian tersebut tampaknya harmonisasi dalam masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah setempat. Apalagi konflik yang terjadi tidak hanya konflik horizontal, namun juga vertikal. Padahal menurut Coleman dan Rosberg, konsep persatuan dan harmonisasi masyarakat didukung oleh dua dimensi harmonisnya hubungan antar masyarakat

(dimensi horizontal) dan harmonis juga hubungan antar masyarakat dan pemerintah (dimensi vertikal) (Moeis, 2009: 3).

Umumnya konflik yang terjadi tidak sampai pada konflik yang berkembang dan tidak sampai membawa identitas suku atau agama. Namun tidak menutup kemungkinan akan menjadi konflik berskala besar yang disertai dengan melibatkan simbol-simbol suku dan agama, karena dari segi suku dan agama Musi Rawas merupakan kabupaten yang memiliki heterogenitas tinggi.

Jika tidak diantisipasi dengan mencari faktor apa sebenarnya yang mendominasi terjadinya konflik maka konflik akan menjadi besar dan berlarut-larut. Sebagaimana dijelaskan oleh Sudiadi bahwa sebagian besar konflik besar yang terjadi diawali oleh hal atau konflik kecil, contohnya disebabkan oleh perebutan air irigasi (sumber daya alam) (2009: 2).

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas tersebut menerangkan bahwa walaupun konflik yang terjadi sudah diselesaikan secara adat (menggunakan mekanisme resolusi konflik adat setempat) namun konflik yang lain terus bermunculan. Seharusnya dengan eksistensinya lembaga adat konflik dengan kekerasan bisa diminimalisir bahkan tidak ada lagi (Sumpeno, 2009: 169). Artinya ada unsur yang belum tersentuh oleh pemerintah dan lembaga adat setempat. Menurut pengamatan penulis dengan didasari dari hasil observasi awal, diambil kesimpulan sementara bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya konflik pada masyarakat ialah budaya masyarakat Melayu Musi Rawas. Oleh karena itu Peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana unsur yang berpotensi konflik dalam aspek budaya masyarakat Melayu Musi Rawas.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan masalah dan fokus penelitian, maka penelitian ini adalah

penelitian kualitatif dalam bahasa antropologi disebut sebagai penelitian *etnografi*. Penelitian yang bertujuan mendeskripsikan kondisi sosial budaya suatu masyarakat dan dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan menjawab pertanyaan mengenai keadaan sekarang dari objek yang diteliti. Sedangkan karakteristik datanya berupa kajian sosial budaya.

Marzali (Spradlay, 1997:xv-xvi) menyatakan, penelitian kualitatif cenderung menggunakan pola; a) membentuk siklus dan memiliki proses yang berulang-ulang, b) membuat catatan mengenai data, c) menganalisa data yang dikumpulkan. Proses penelitian telah dilakukan secara berulang-ulang ke lokasi penelitian yaitu Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan dengan membuat catatan data dan informasi yang dilihat dan didengar serta dianalisis dan ditafsirkan makna-makna perilaku informan yang muncul untuk kemudian sampai kepada penulisan laporan penelitian.

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Musi Rawas, merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang secara geografis terletak pada posisi 102^o07'00"-103^o40'00" BT dan 2^o20'00"-3^o38'00" LS. Luas kabupaten Musi Rawas adalah 1.236.582,66 Ha, berada di bagian barat Provinsi Sumatera Selatan, tempat pertemuan hulu Sungai Musi dengan aliran Sungai Rawas.

Kabupaten Musi Rawas berbatasan dengan Provinsi Jambi di sebelah utara, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Empat Lawang, di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan di sebelah timur dengan Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Muara Enim.

Sebagaimana data keanekaragaman masyarakat Musi Rawas yang telah disajikan sebelumnya beserta penjelasannya maka dari 21 kecamatan dipilih beberapa kecamatan yang heterogenitas tinggi baik dari segi agama maupun suku dan sering terjadi

konflik. Kecamatan yang termasuk dalam kategori ini adalah: Kecamatan Rawas Ulu, Tugumulyo, dan Megang Sakti.

Informan utama penelitian ini dipilih berdasarkan fungsi atau kedudukan dalam masyarakat. diantaranya adalah: ulama, pengurus lembaga adat, pejabat pemerintah, wakil-wakil anggota masyarakat dari orangtua dan pemuda yang dipilih secara *snowball sampling*, yaitu informan yang ditunjuk oleh informan pertama. Informan ketiga adalah orang yang ditunjuk oleh informan kedua, dan begitu seterusnya, sampai tidak dibutuhkan data tambahan lagi atau sifat data sudah jenuh.

Menurut Spredley (1997:125) dalam menetapkan informan kriteria yang diperhatikan beberapa diantaranya adalah sebagai berikut; 1) mereka yang masih atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti, 2) mereka yang mempunyai kesempatan atau waktu cukup banyak untuk dimintai informasi 3) mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil rekayasa sendiri.

Selanjutnya digunakan kriteria tambahan dalam pemilihan informan yang dijabarkan oleh Spradlay (1997: 125) sebagai berikut; sehat fisik maupun mental, memahami dengan baik kondisi sosial dan budaya masyarakatnya dan merupakan penduduk yang menetap (bukan pendatang yang berpindah-pindah).

Berdasarkan kriteria tersebut, maka informan kunci dari penelitian ini adalah tokoh-tokoh masyarakat, baik tokoh agama maupun tokoh adat kecamatan Rawas Ulu, Tugumulyo, dan Megang Sakti. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka sudah lama bertempat tinggal di kabupaten Musi Rawas bahkan terlibat langsung dalam permasalahan kemasyarakatan. Sedangkan informan pendukung adalah masyarakat setempat yang memenuhi kriteria baik dari jenis kelamin laki-laki maupun perempuan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi peran serta (*participant observation*) terhadap situasi sosial pada kehidupan masyarakat Kabupaten Musi Rawas yang diwakili tiga kecamatan. Wawancara (*interview*) dilakukan secara mendalam baik yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur, yang terbuka maupun tertutup terhadap informan, guna mendapatkan data-data tentang unsur yang berpotensi konflik dalam masyarakat setempat. Melakukan pengkajian dokumentasi (*document study*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Konflik dalam Mentalitas dan Tradisi Masyarakat Melayu Musi Rawas

Fenomena keragaman suku, agama, pandangan politik merupakan hal yang tidak dapat dielakkan lagi, bahkan menurut kata pengantar Mughni (Mahfud, 2006:vii) menyatakan bahwa dunia saat ini merupakan kampung besar (*global village*) yang akan berdampak kepada terhapusnya batasan ruang, dan waktu, sehingga kondisi masyarakat yang heterogen dapat ditemui di negara manapun. Saat ini ditemukan dalam 185 negara di dunia hanya sedikit masyarakat yang homogen secara kultural, hampir semuanya merupakan negara yang terdiri dari beragam suku dan budaya.

Dengan kondisi yang semakin beragam tersebut menuntut kita sebagai bagian dari masyarakat untuk semakin dewasa dalam bersikap. Menurut Watson (2000: 110), kondisi yang multikultural tersebut menghendaki semua kita menerima perbedaan, terbuka terhadap perubahan, menghendaki kesetaraan, mampu mengenali diri kita yang sesungguhnya dalam hubungan dengan orang lain; prinsip ini harus menjadi pijakan dalam mengambil setiap tindakan.

Artinya dalam kehidupan yang multikultural seharusnya kita tidak lagi

menuntut orang lain untuk sama seperti kita. Sedangkan pada kenyataannya masih banyak, bahkan sebagian besar dari kita bangsa Indonesia masih bermental menuntut orang lain untuk sama dengan kita, padahal menghormati dan menerima perbedaan merupakan perekat dalam hubungan sesama manusia yang memiliki perbedaan-perbedaan. Salah satu konflik antar agama yang baru terjadi di Indonesia tepatnya di Kabupaten Temanggung sangat mengagetkan banyak pihak, karena sebagaimana kita ketahui, selama ini Kabupaten Temanggung termasuk kota yang aman dan jauh dari konflik. Bahkan karena peristiwa tersebut Azyumardi Azra sebagai pakar sosiologi Indonesia menghimbau melalui wawancara di televisi agar setiap pemerintah daerah dan aparat keamanan mulai mencari potensi-potensi konflik daerahnya masing-masing, agar peristiwa yang merugikan dapat diantisipasi, ditekan bahkan dihilangkan. (TVone, 10 Februari 2011).

Keberagaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia memiliki sisi positif dan negatif, menjadi berkah dan sumber kerawanan konflik. Budaya dapat menjadi potensi konflik, terutama pada kebudayaan yang mengandung unsur kekerasan. Sedangkan menurut Nitibaskara (2002: 20) terdapat cukup banyak kandungan nilai-nilai kekerasan yang tersimpan dalam unsur-unsur budaya yang dianut oleh berbagai etnis di Indonesia. Masyarakat Jawa yang memiliki konsep "tepo seliro" atau toleransi tinggipun terkandung unsur negatif dalam budayanya. Hal tersebut dinyatakan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X bahwa dalam memaknai paham dan ajaran Jawa seringkali terkandung dua pengertian yang saling tolak belakang, ada sisi positif dan negatifnya (Nitibaskara, 2002: 8).

Nitibaskara juga mengatakan bahwa jika nilai-nilai yang mengandung kekerasan tersebut saling bertemu maka akan terjadi konflik budaya, sebagaimana konflik yang

terjadi antara etnis Madura dan etnis Banten (2001) di Kramat Jati Jakarta Timur, kemudian konflik di Ujung Menteng Jakarta Timur antara etnis Madura dan etnis Betawi (2002). Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa konflik dengan kekerasan merupakan konflik yang tidak membangun, bahkan sangat merugikan.

Khusus untuk masyarakat Musi Rawas yang mulai memiliki keberagaman suku dan agama pada tahun 1933, tepatnya saat terjadi program transmigrasi besar-besaran ke Musi Rawas juga memiliki potensi konflik. Aspek yang berpotensi konflik tidak terdapat pada kebijakan pemerintah karena menurut pengamatan penelitian kebijakan-kebijakan pemerintah daerahnya sudah cukup mengakomodasikan perbedaan-perbedaan yang ada, kebijakan pemerintah daerah sudah bersumber dari kondisi geografis, sosial dan budaya. Namun aspek yang berpotensi konflik penulis temukan pada aspek kebudayaan masyarakatnya, dalam bentuk nilai-budaya terkhusus pada poin mentalitas masyarakat dan kebiasaan masyarakat yang merupakan buah dari konsep nilai yang diakui baik.

Berdasarkan kajian pustaka pada bab tiga, maka yang dimaksud budaya dalam penelitian ini adalah budaya dalam bentuk total pikiran/ideel yang berbentuk nilai-nilai dalam masyarakat (mentalitas) terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat serta hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup. Mentalitas tersebut menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari tetapi tidak terlembaga secara adat. Faktor mentalitas yang dimaksud di sini berdasarkan rumusan Kluckhohn (Koentjaraningrat, 1993: 37-42) yaitu nilai budaya mengenai hakekat dari hidup dan hubungan manusia dengan sesamanya.

Sesuai dengan temuan khusus penelitian, maka dapat dinyatakan bahwa

pada unsur budaya masyarakat Musi Rawas terdapat unsur yang berpotensi konflik yaitu pada wujud mentalitas masyarakat Melayu Musi Rawas dan kebiasaan yang lahir dari konsepsi yang hidup dalam masyarakatnya. Karena mengandung unsur kekerasan dalam wujud mentalitas dan kebiasaan. Unsur-kekerasan yang tentunya sangat berpotensi menyebabkan konflik dimasa yang akan datang.

Unsur kekerasan ditemukan dalam beberapa ungkapan yang sudah ada turun temurun seperti; *"apo-apo tu dak usah manjangi tali kelambu"* (segala sesuatu itu tidak perlu repot-repot), *"wong kito tu dak katek yang mati karno sakit, matinyo keno tujuh galo"* (seluruh orang kita dak ada yang mati karena sakit, matinya karena tujuh), merupakan ungkapan yang menggambarkan bentuk mentalitas yang tidak mendukung kehidupan harmonis dalam masyarakat, apalagi dengan masyarakat yang sudah dan semakin beragam. Untuk lebih jelasnya bagaimana mentalitas yang ditemukan menjadi potensi konflik akan dijelaskan berikut ini:

Pertama secara garis besar terdapat 3 mentalitas yang dianggap mengandung kekerasan dan tentunya berpotensi konflik, mentalitas tidak mahu mengalah, suka menerabas dan tertutup. Padahal hasil penelitian Moeis dkk (2009: 78) mengatakan bahwa mentalitas terbuka dan toleran merupakan kunci terjadinya harmonisasi sosial dan integrasi. 3 Mentalitas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Egois (Tidak Mahu Mengalah)

Sebagaimana *"tepo seliro"* dari etnis Jawa yang memiliki sisi negatif dan positif dari sudut pandang tertentu, maka mentalitas tidak mudah mengalah yang dimiliki masyarakat Musi Rawas juga memiliki sisi positif, apalagi jika ditempatkan pada posisi yang benar contohnya tidak mudah mengalah terhadap nasib, tidak mudah mengalah

terhadap kondisi alam dan lain-lain, disebut oleh Kluchkohn (Koentjaraningrat, 1993: 31) sebagai nilai budaya dalam pandangan manusia terhadap alam. Namun sayang jika mentalitas tidak mudah mengalah juga muncul pada waktu yang tidak tepat, yaitu saat kita berhubungan dengan orang lain atau pada masalah dasar hubungan manusia dengan sesamanya, jika tidak ada yang mengalah maka permasalahan akan semakin pelik dan membesar serta sukar untuk dipecahkan. Jika mentalitas ini dimiliki oleh sekelompok orang maka konflik yang besarpun bisa terjadi.

Mental tidak suka mengalah yang terkandung dalam masyarakat Melayu Musi Rawas salah satunya dilatarbelakangi kondisi alamnya yang hutan dengan hewan liar yang buas, serta sebagian berawa-rawa, sehingga untuk bertahan hidup memerlukan mental yang berani dan tidak mudah mengalah/menyerah. Mental tidak mudah mengalah ini dapat kita lihat dari ungkapan turun-menurun yang terdapat dalam masyarakat "*lantakelah, mati sikok mati galo*" (lanjut terus, walau sampai mati satu, harus mati semua). Dari ungkapan tersebut ditafsirkan; 1) bahwa masyarakat Musi Rawas (asli) memiliki jiwa tidak mau menyerah jika dalam hubungan dasar antar sesama manusia menjadi egois, jika merasa diganggu maka harus melawan 2) seseorang yang berani melawan akan mendapat penghargaan sosial.

Salah satu kasus yang mewakili kasus yang sama akan diceritakan disini, informan S menceritakan kepada peneliti, seorang Bapak Ar (nama samaran penduduk Musi Rawas) bercerita pada S dengan bangga tentang peristiwa yang pernah dialaminya. Bahwa dia baru saja mengadakan perjalanan jauh, dan berkenalan dengan penumpang yang duduk disebelah tempat duduknya (berasal dari etnis lain), sambil berbincang-bincang sang bapak mengeluarkan beberapa makanan yang ia bawa untuk dimakan bersama-sama, beberapa saat kemudian

makanan tersebut habis. Namun beberapa menit kemudian sang teman baru bapak tadi mengeluarkan makanan yang ia bawa, sayangnya makanan tersebut hanya dimakan sendiri tanpa menawarkan ke Bapak Ar, serta merta Bapak Ar marah "*nak lemak dewek kau ni, cara kau bekawan cakitu?*". Dari peristiwa tersebut terlihat bahwa mentalitas yang tumbuh adalah mentalitas yang tidak mau mengalah untuk membiarkan apa yang dilakukan orang lain dan menciptakan kondisi harmonis.

Walaupun kekerasan mentalitas dalam beberapa kasus masih berlangsung antar personal, namun tidak menuntut kemungkinan suatu saat akan terkoordinir, apalagi nilai budaya tersebut diakui kebenarannya oleh masyarakat. Dalam hal ini Koentjaraningrat berpendapat bahwa sedikit saja dua budaya yang sama-sama mengandung nilai-nilai kekerasan saling bersinggungan, atau salah satu budaya memiliki nilai kekerasan, dan pihak lain merasa tidak nyaman maka akan berpotensi besar menjadi konflik antar personal yang kemudian hari dapat berubah menjadi konflik (huru-hara) massal yang bahkan bisa berkelanjutan (2002: 8).

Sebagaimana keterangan Thorsten Sellin (Nitibaskara 2002: 24) menyatakan bahwa hal-hal yang dapat memicu konflik, khususnya konflik budaya adalah:

- a) Jika suatu kelompok kebudayaan bermigrasi ke daerahkelompok kebudayaan lain.
- b) Jika terjadi benturan norma atau hukum dalam dua area kebudayaan yang berbatasan, salah satu budaya atau keduanya memiliki unsur kekerasan .
- c) Jika norma atau hukum dari suatu kelompok kebudayaan diperluas dan diberlakukan pada kelompok kebudayaan yang lain.

2) Suka Menerabas

Mentalitas suka menerabas maksudnya adalah mentalitas yang menginginkan tercapainya tujuan dengan secepat-cepatnya tanpa banyak kerelaan berusaha dan permulaan secara langkah demi langkah (Koentjaraningrat, 1993: 46). Mentalitas suka menerabas oleh Koentjaraningrat disebut sebagai mentalitas "mencari jalan paling gampang".

Koentjaraningrat berpendapat bahwa sebenarnya mentalitas suka menerabas telah dimiliki secara universal oleh penduduk Indonesia begitujuga dengan masyarakat Kabupaten Musi Rawas, oleh karena itu peneliti melihat mentalitas suka menerabas ini sebagai potensi penyebab konflik dalam masyarakat Musi Rawas.

Seperti kasus yang ditemukan berikut ini, ada seorang pengendara motor yang kebut-kebutan di jalan, masyarakat sudah merasa terganggu karenanya, karena merasa terganggu beberapa orang sengaja memasang paku ditengah jalan, akhirnya ban motor tersebut kempes dan tidak bisa berjalan lagi. Hal tersebut juga bisa terjadi bagi pengendara mobil pribadi atau mobil angkutan umum antar provinsi, karena Musi Rawas dilewati jalan lintas Sumatera. Jika masyarakat merasa terganggu akan kehadiran mereka, masyarakat merasa mereka terlalu angkuh dengan tidak menghargai keberadaan masyarakat yang berada disekitar jalan, atau merasa para pengendara keterlaluhan dalam mengendarai motor, tidak heran jika suatu saat terjadi pelemparan mobil dengan batu dan lain sebagainya. Saat ini memang mentalitas suka menerabas belum menjadi persoalan yang sangat meresahkan karena tidak terkoordinir. Bisa dibayangkan jika masyarakat yang memiliki mentalitas suka menerabas berkonflik, akibatnya pasti sangat besar dan bisa jadi meluas.

Terdapat juga ungkapan yang tumbuh dalam masyarakat Melayu Musi Rawas yang berbunyi

"Apo-apo tu dak usah manjangi tali kelambu"

Dari ungkapan tersebut tergambar bahwa segala sesuatu itu lebih baik difikirkan dan dikerjakan secara praktis saja. Mentalitas yang dimiliki masyarakat Melayu Musi Rawas ini menciptakan kondisi dimana suku pendatang harus lebih mengalah agar tercipta kondisi yang harmonis. Hal inilah salah satu yang menyebabkan kenapa di Kabupaten Musi Rawas tidak sampai terjadi konflik besar. Namun kondisi harmonis yang tercipta tersebut tidaklah permanen, karena ada unsur keterpaksaan, dan kekurangnyamanan dari salah satu pihak (pihak pendatang). Bahkan hal tersebut nampak dari pola pemukiman penduduknya, dimana masih mengelompok berdasarkan suku seakan-akan berusaha agar tidak sering berinteraksi dengan masyarakat Melayu Musi Rawas.

Mentalitas tertutup ternyata juga dimiliki masyarakat Musi Rawas. Sebenarnya mentalitas tertutup ini sangat berhubungan dengan mentalitas tidak suka mengalah, atau bisa jadi mentalitas tertutup ini disebabkan oleh mentalitas tidak suka mengalah.

Maksud dari mentalitas tertutup yang dimiliki masyarakat Musi Rawas ini sebenarnya mendekati dengan *primordialisme*. Masyarakat Musi Rawas akan sangat baik terhadap orang yang telah termasuk ke dalam ikatan keluarga, dan ikatan daerah. Tradisi yang disebut dengan "Angkanan" merupakan tradisi yang berusaha mempererat hubungan jauh menjadi hubungan dekat, dari orang lain menjadi saudara. Setelah menjadi saudara maka orang Musi Rawas akan sangat setia terhadap angkanannya, atau saudara sederahnya, kesetiaan tersebut meliputi sikap mengayomi terhadap semua anggota masyarakat sederahnya dan *seangkanan*, termasuk kepada orang atau pendatang yang menjadi *angkanannya*.

Sikap yang sebaliknya akan terjadi jika bertemu dengan orang lain (diluar dari *angkalan* dan daerahnya), bahkan menurut keterangan dari beberapa masyarakat ada sebuah jalan yang diharapkan tidak menggunakan helm karena menghindari kejahatan, menurut masyarakat biasanya jika tidak menggunakan helm itu berarti orang yang tinggal didaerah tersebut dan jauh dari bahaya penodongan dan lain sebagainya. Sebaliknya jika pengendara motor memakai helm maka dia bukan sedaerah, maka biasanya akan terjadi kejahatan terhadapnya.

Ketiga mental ini kemudian menciptakan suatu kondisi dimana para pendatang diharuskan atau dengan kata lain terpaksa untuk bersifat mengalah, demi terciptanya suasana yang harmonis, sebagaimana yang diungkapkan dalam beberapa wawancara, salah satunya wawancara bersama MJ merupakan mantan anggota dewan Musi Rawas pada saat orde baru mengatakan;

”...Sehingga posisi penduduk pendatang selalu diharuskan untuk mengalah, olehkarena itu sampai saat ini tidak ada konflik yang bersekala besar sebagaimana pernah terjadi di Poso” (31 Januari 2011)

Padahal dalam suatu masyarakat yang beragam akan tercipta hubungan yang harmonis ketika kedua belah pihak memiliki kesadaran multikultural, kesadaran *otherness* masing-masing pihak memahami bahwasannya masing-masing memiliki perbedaan dan sama-sama berusaha untuk saling berhati-hati. Sedangkan dalam masyarakat Musi Rawas terjadi hubungan dimana salah satu pihak merasa terpaksa dan kurang nyaman. Sebenarnya rasa terpaksa yang dipilih oleh penduduk pendatang bertujuan menciptakan suasana harmonis, namun sayangnya kondisi harmonis yang diciptakan oleh penduduk pendatang tersebut

merupakan kondisi harmonis yang tidak permanen. Dalam hal ini Paeni (2005: 119) berpendapat, konflik-konflik antar kelompok etnis yang terjadi di berbagai daerah di negeri kita bermula dari endapan beragam kegelisahan yang terpendam dalam sanubari masyarakat. Jadi endapan kegelisahan dari suku pendatang bisa jadi suatu saat akan meledak menjadi konflik budaya yang kita takutkan.

Beberapa contoh konflik budaya yang bersumber dari kekerasan yang terkandung dalam budaya masyarakatnya yaitu terjadi antara etnis Madura dan etnis Banten (2001) di Kramat Jati Jakarta Timur, kemudian konflik di Ujung Menteng Jakarta Timur antara etnis Madura dan etnis Betawi (2002) yang berlangsung dari bulan Februari sampai tanggal 1 Maret 2002.

Begitujuga dalam budaya masyarakat Melayu Musi Rawas, berdasarkan hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dalam penelitian ini, ditemukan juga nilai-nilai kekerasan dalam tradisinya, terutama dalam tradisi ”tujuh”. Sutikarini juga mengatakan bahwa tradisi ”tujuh” dalam masyarakat Sumatera Selatan sama dengan tradisi Carok, (2003: 24-31). Dalam penelitian Dr. Latief Wiyata carok dinyatakan sebagai sumber konflik dalam budaya etnis Madura.

Kebiasaan ”tujuh” merupakan daya pendorong untuk mencelakai siapa saja yang menyinggung perasaan seseorang. Tradisi ini merupakan implikasi dari orientasi nilai mengenai hakekat hidup, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa orientasi nilai hakekat hidup yang dimaknai oleh masyarakat Musi Rawas akan menciptakan mentalitas yang suka menerabas. Mentalitas yang suka menerabas ini kemudian menciptakan kebiasaan ”tujuh”.

Kekerasan fisik tersebut dibenarkan secara lisan dalam rangka menyelesaikan perkara yang menyangkut nama baik, martabat dan harga diri seseorang yang telah

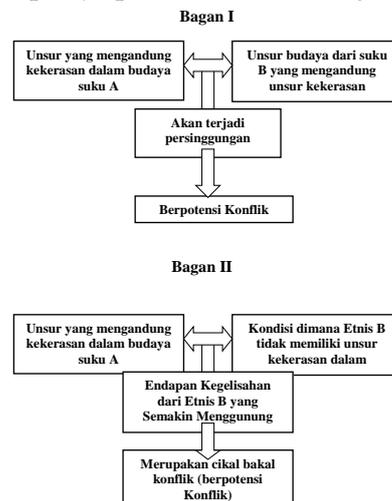
diremehkan. Meskipun ada sedikit sebab lainnya yang menyangkut harkat atau martabat seseorang yang direndahkan.

Sebenarnya kekerasan tersebut dilakukan adalah untuk menyelesaikan masalah, namun yang jadi masalah kadang justru menimbulkan masalah yang baru dan akan berdampak panjang. Dan tetap saja perlu berbagai pendekatan yang bersifat multidisipliner, terlebih-lebih bila dua jenis nilai-nilai budaya semacam itu saling bersinggungan dan meledakkan konflik kekerasan kolektif antar pendukung budaya-budaya tersebut. Apalagi sebagaimana temuan khusus penelitian bahwasannya penduduk Musi Rawas terdiri dari etnis Jawa, Madura, Bali, dll. Menurut hasil penelitian etnis Bali juga memiliki "Rangda" yang mengandung unsur kekerasan. Mengenai bagaimana budaya "tujuh" dan mentalitas tersebut dapat menjadi potensi konflik akan dijelaskan lebih lanjut dalam pembahasan.

Ketiga mentalitas dan tradisi "tujuh" tersebut dapat menimbulkan konflik berskala besar, karena menciptakan kondisi dimana para pendatang diharuskan untuk mengalah bahkan terpaksa mengalah demi terciptanya hubungan yang harmonis. Padahal menurut Paeni (2005: 119) konflik-konflik antar kelompok etnis yang terjadi di berbagai daerah di negeri kita bermula dari endapan beragam kegelisahan yang terpendam dalam sanubari masyarakat. Sehingga hubungan harmonis sementara yang diciptakan oleh masyarakat pendatang di khawatirkan justru akan memancing sebuah konflik yang besar jika endapan beragam kegelisahan masyarakat pendatang sudah menggunung.

Bentuk kekerasan yang terkandung dalam budaya Melayu Musi Rawas, jika suatu saat berinteraksi dengan budaya lain seperti halnya dengan budaya Madura atau Jawa (karena penduduk Musi Rawas juga terdiri dari etnis Madura dan Jawa) dan suatu saat pasti terjadi persinggungan, kemudian menurut Nitibaskara persinggungan ini

merupakan cikal-bakal konflik massal (2002: 20). Tidak hanya jika kedua budaya yang saling bertemu dan kedua-duanya memiliki unsur kekerasan baru menimbulkan konflik. Jika yang memiliki unsur kekerasan dalam budaya adalah salah satu pihak, pihak lain tidak, masih saja dapat menimbulkan konflik. Karena kondisi ini menciptakan pihak yang tidak memiliki unsur kekerasan merasa terpaksa menerima perlakuan, dan terendaplah perasaan ketidakpuasan. Menurut Paeni (2005: 119) perasaan tidak puas dan tidak senang ini juga menjadi cikal bakal konflik, karena suatu saat endapan gelisah tersebut akan memuncak. Untuk lebih jelasnya akan dibuat bagan kronologis terciptanya potensi konflik sebagai berikut:



SIMPULAN

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: Kebudayaan Melayu Musi Rawas yang merupakan potensi munculnya konflik adalah mentalitas dan tradisi "tujuh", karena didalamnya terkandung unsur kekerasan. Dalam menemukan unsur kekerasan atau potensi konflik pada wujud mentalitas (nilai-budaya) dan tradisi penganalisisan dilakukan dengan skema Kluckhohn, terdiri dari: mentalitas suka menerabas, egois (tidak suka

mengalah), dan tertutup. Sedangkan dalam wujud tradisi dapat dilihat pada tradisi kebiasaan "tujuh", merupakan tradisi pemulihan harga diri bagi pihak yang tercemar nama baik atau disakiti, misalnya salah satu anggota keluarganya dibunuh, maka keluarga pembunuh juga harus ada.

Upaya pendidikan dalam mengatasi unsur yang berpotensi konflik dapat dilihat dari kebijakan yang dibuat oleh lembaga legislatif komisi pendidikan maupun dinas pendidikan sebagai lembaga eksekutif yang bekerja di lapangan. Secara umum pemerintah sudah merumuskan bahwa tujuan kebijakan adalah membentuk masyarakat yang harmonis, hal ini dapat dilihat dari visi dan misi Kabupaten Musi Rawas. Secara khusus, berupa program dan kebijakan khusus pendidikan dalam menyikapi potensi konflik dan keanekaragaman penduduk Musi Rawas belum ada.

berpotensi konflik yang ditemukan dalam penelitian ini merupakan unsur yang termasuk kedalam kategori nilai budaya tidak relevan yang selanjutnya dijadikan dasar

pendidikan multikultural Kabupaten Musi Rawas, diintegrasikan ke dalam setiap mata pelajaran dengan bentuk model pendidikan multikultural masing-masing sekolah baik dengan dikenalkan bagaimana dampak negatifnya sehingga tumbuh generasi yang memiliki sikap toleransi tinggi, terbuka terhadap perubahan.

Berdasarkan hasil temuan, maka direkomendasikan saran-saran sebagai berikut: Diharapkan bagi sekolah-sekolah di Kabupaten Musi Rawas segera mengembangkan model pendidikan multikultural Kabupaten Musi Rawas, dan hasil temuan penelitian dapat dijadikan salah satu landasan dalam pembentukan model pendidikan multikultural Kabupaten Musi Rawas. Bagi mahasiswa dan praktisi pendidikan Kabupaten Musi Rawas, sebaiknya dilakukan penelitian mengenai unsur lokal yang memicu terwujudnya integrasi dan harmonisasi sosial Kabupaten Musi Rawas sehingga lebih komprehensif dalam mengembangkan model pendidikan multikultural Kabupaten Musi Rawas.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Manneke. 2005. "Pendidikan Multikultural dalam Perspektif Sejarah", dalam Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (ed), *Jatidiri Budaya dalam Masyarakat Multikultural*, (hlm. 213-226). Jakarta: CV. Karya Agung.
- Joko, H.P. 2003. *Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Demokrasi Lokal*. Artikel Institute For Research And Empowerment (IRE). (online). (<http://www.musi-rawas.go.id/>), diakses 24 September 2010.
- Koentjaraningrat. 1993. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mahfud, Choirul. 2008. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moeis, Isnarmi. Fitri dkk. 2009. "Potensi-potensi Lokal yang Berpengaruh terhadap Integrasi dan Harmonisasi Sosial dalam Masyarakat Sumatera Barat". *Penelitian Strategis Nasional*. Penelitian DP2M Depdiknas.
- Musi rawas Dalam Angka 2003*. 2003. Muara Beliti: Diperbanyak oleh BPPD dan BPS Kabupaten Musi Rawas.
- Musi rawas Dalam Angka 2010*. 2010. Muara Beliti: Diperbanyak oleh BPPD dan BPS Kabupaten Musi Rawas.
- Nitibaskara. 2002. "Etnografi Kekerasan di Indonesia". Makalah disajikan dalam *Simposium Internasional Antropologi ke-3* di Denpasar, Bali, 18 Juli 2001.
- Paeni, Mukhlis. 2005. "Dari Pluralisme Menuju Multikulturalisme (Sebuah

- Prespektif Sejarah)”, dalam Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (ed), *Pendidikan Multikultural dan Revitalisasi Hukum Adat dalam Perspektif Sejarah* (hlm. 118-131). Jakarta: CV. Karya Agung.
- Sudiadi. 2009. *Menuju Kehidupan Harmonis dalam Masyarakat yang Majemuk (Suatu Pandangan Tentang Pentingnya Pendekatan Multikultur dalam Pendidikan di Indonesia)*. Makalah Dosen Universitas Indonesia Jakarta (online), (<http://www.staff.ui.ac.id/>), diakses 4 oktober 2010.
- Spradley, James P. Tanpa Tahun. *Metode Etnografi*. Terjemahan oleh Misbah Zulfa Elizabeth. 1997. Yogyakarta:Tiara Wacana.
- Wahid Institute. 2008. *Monthly Report on Religius Issues Edisi 16*. (online). (www.wahidinstitute.org), diakses 21 September 2010
- Watson, C.W. 2000. *Conceptst in Social Sciences: Multiculturalism*. Philadelphia: Open University Press.